



Warga Boleh Sanggah Dugaan Judol

■ Penghentian Sementara Penyaluran Bansos untuk 7.001 Penerima di DIY

YOGYA, TRIBUN - Dinas Sosial (Dinsos) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menghentikan sementara penyaluran bantuan sosial kepada 7.001 penerima manfaat yang terindikasi tidak menggunakan bantuan sebagaimana mestinya, termasuk untuk aktivitas judi *online*.

Temuan tersebut tersebar di lima kabupaten/kota, yakni Bantul sebanyak 1.711 penerima, Gunungkidul 2.397 penerima, Kulon Progo 849 penerima, Sleman 1.106 penerima, serta Kota Yogyakarta 938 penerima. Kepala Dinsos DIY, Endang Patmintersih, menjelaskan, penghentian bantuan tersebut merupakan tindak lanjut atas temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Data itu kini diverifikasi ulang melalui dinas sosial kabupaten/kota.

"Jadi, yang terindikasi judi itu yang terdata ada sekitar 7.001, itu sementara kita berhentikan. Ini kebijakan

Kementerian Sosial berdasarkan data dari PPATK. Lalu, kita cek lagi data tersebut. Kementerian Sosial memberikan ruang, bukan komplain istilahnya, tapi masukan dari masyarakat yang dinyatakan terindikasi judi tadi," ujarnya, Senin (17/11).

Endang menegaskan bahwa bantuan tidak diberikan jika terbukti digunakan untuk judi. Penghentian ini terutama menasar penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Pendamping dan koordinator PKH di setiap kabupaten/kota kini bekerja melakukan pengecekan.

Endang menambahkan bahwa tindak lanjut terhadap penerima yang benar-benar terbukti berjudi menjadi kewenangan kabupaten/kota.

Masyarakat yang merasa tidak melakukan pelanggaran dapat menyampaikan penjelasan kepada dinas sosial setempat. Klarifikasi akan dianggap selesai jika masyarakat tidak memberikan penjelasan.

Endang juga menyampaikan bahwa proses klarifikasi dapat melibatkan seluruh anggota keluarga, bukan hanya penerima bantuan yang terdaftar.

"Misalkan, yang menerima PKH itu istrinya, karena penerima PKH biasanya perempuan. Tapi, bantuan itu kan untuk keluarga. Bisa jadi istrinya tidak berjudi, tetapi suaminya atau anaknya berjudi. Dan, mereka memakai bantuan itu untuk judi. Walaupun dia tidak mengakui, tapi ternyata yang berjudi adalah anggota keluarganya. Sama saja," ujarnya.

Dinsos mendorong perubahan perilaku dan pemahaman penerima bantuan agar tidak bergantung pada bansos karena bersifat se-

mentara. Dinsos DIY juga telah melakukan sosialisasi perubahan perilaku melalui program restorasi sosial.

"Kami dalam program restorasi sosial ini keilling bersama anggota dewan, pakar budaya, akademisi, melakukan sosialisasi untuk mengubah perilaku dan *mindset*. Tinggal masyarakatnya mau berubah atau tidak. Ini PR kita," katanya.

Surat pernyataan

Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial P3A Gunungkidul, Suyono, mengaku belum menerima data *by name by address* terkait penerima PKH yang terkena penghentian penyaluran. Sebab, kewenangan tersebut merupakan kebijakan Kemensos. "Daerah hanya memfasilitasi money bantuan PKH ke penerima manfaat," kata Suyono saat dikonfirmasi pada Senin.

Meski demikian, Dinsos Gunungkidul tetap membuka ruang fasilitasi apabila terdapat penerima manfaat yang merasa tidak pernah melakukan aktivitas judi *online* namun mengalami penghentian bantuan. Pihaknya meminta masyarakat untuk melakukan pengecekan dan melapor ke pendamping PKH atau kantor kalurahan setempat.

"Nanti, kami akan buat surat pernyataan klarifikasi bansos setelah penerima manfaat menyanggah melalui aplikasi SIKS-NG Online milik kalurahan," tuturnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul, Markus Tri Munarja, mengimbau agar penerima bantuan sosial tidak menggunakannya untuk judol. Bahkan, sesuai instruksi bupati, bansos dari pemerintah juga tidak diperbolehkan untuk melakukan perawatan wajah atau kegiatan yang serupa. (**han/ndg**)

TEMUAN PPATK

- Dinsos DIY menghentikan sementara penyaluran bantuan sosial kepada 7.001 penerima manfaat di wilayahnya.
- Ribuan penerima manfaat di lima kabupaten/kota itu terindikasi tidak menggunakan bantuan sebagaimana mestinya, termasuk untuk aktivitas judi *online*.
- Penghentian bantuan tersebut merupakan tindak lanjut atas temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005